

# FAKTOR - FAKTOR PERCEPATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTORASI GAMBUT DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SUNGAI TOHOR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

Hasim As'ari<sup>1</sup>, Febri Yuliani<sup>2</sup>, Abdul Sadad<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

## Abstrak

Lahan gambut termasuk vegetasi yang tumbuh di atasnya merupakan bagian dari sumberdaya alam yang mempunyai fungsi untuk pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan keanekaragaman hayati, dan pengendali iklim (melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon).

Fenomena gambut yang terjadi di Provinsi Riau berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan akibat dari adanya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan ekosistem gambut yang diluar kendali dan tidak bertanggung jawab. Misalnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi memberikan dampak berupa kabut asap yang melanda wilayah Riau dan Sumatera.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau. Adapun alasan dilakukan pemilihan obyek penelitian disebabkan rusaknya ekosistem gambut di Provinsi Riau dan untuk hal tersebut Faktor-Faktor Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau menjadi sangat penting.

Hasil penelitian adalah upaya Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Konseptualisasi program restorasi lahan gambut.

Kata kunci : Implementasi, kebijakan, dan lahan gambut

## PENDAHULUAN

Lahan gambut termasuk vegetasi yang tumbuh di atasnya merupakan bagian dari sumberdaya alam yang mempunyai fungsi untuk pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan keanekaragaman hayati, dan pengendali iklim (melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon).

Fenomena gambut yang terjadi di Provinsi Riau berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan akibat dari adanya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan ekosistem gambut yang diluar kendali dan tidak bertanggung jawab.



Misalnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi memberikan dampak berupa kabut asap yang melanda wilayah Riau dan Sumatera.

Sungait Tohor diambil dari sebuah nama sungai, yaitu Sungai Tohow yang kemudian sungai tersebut menjadi Sungai Tohor yang artinya sungai yang dangkal/dengkat. Sungai Tohor ini namanya diberikan oleh orang yang membuka perkampungan ini, yaitu berasal dari beberapa orang penduduk Kerajaan Pelalawan dan membawa surat mandate/jelan dari Sultan Pelalawan, yang saat ini (Kabupaten Pelalawan), dan tujuan awalnya mereka ingin berladang padi dan akhirnya menjadi sebuah perkampungan di daerah Pematang Duku (pada saat kampung dibuka sudah ada tanaman duku yang luas, namun tidak ada penduduk). Sungai Tohor adalah sebuah desa kecil yang dengan luas wilayah 68 Km<sup>2</sup> dikategorikan desa dataran rendah dan desa pesisir pantai yang berada pada pesisir pantai timur Pulau Tebing Tinggi dalam wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah gambut.

Banyak penelitian yang sudah dilakukan tentang pengelolaan ekosistem gambut, tetapi hanya sedikit referensi yang melihat dari perspektif kebijakan publiknya. Karena hal tersebut Penelitian ini menyoroti aspek permasalahan sosial yang berpotensi muncul, yaitu “Faktor-Faktor Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau”.

Berdasarkan paparan persoalan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: “Faktor-Faktor Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau?”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Implementasi Kebijakan

Pressman dan Wildaysky (2014:485) mengatakan bahwa implementasi merupakan proses interaksi antara tujuan dan tindakan (*implementation may be viewed as a process of interaction between the setting of goals and action geared to achieving then*). Sedangkan Grindle mengemukakan bahwa implementasi



adalah menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan haru kegiatan pemerintah.

*In general, the task of implementation is to establish a link that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity. It involves, therefore, the creation of a "policy delivery system", in which specific means are designed and pursued in the expectation of arriving at particular ends. (Grindle, 1980:6)*

Menurut Lane (2013:91), implementasi dapat dinyatakan dalam formula formal sebagai berikut :

$$(DF\ 1)\ Implementation = F(Intention, Output, Outcome)$$

dimana implementasi mengacu kepada menghasilkan output dan outcome yang kongruen dengan maksud awalnya. Dengan demikian implementasi memiliki pengertian ganda, yaitu: (1) "eksekusi" di satu sisi dan, (2) fulfill atau penyelesaian (*accomplishment*) disisi lain.

### Ekosistem Gambut

Riau mempunyai lapisan gambut terdalam di dunia, yaitu mencapai 16 meter terutama di wilayah Kuala Kampar Namun demikian selama dua dasa waba terakhir, konversi lahan gambut terutama menjadi lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit dan kayu kertas (*pulp wood*) diperkirakan telah merusak lahan gambut dengan segala fungsi ekologisnya.

Di pihak lain Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang unik dan langka, karena lahan ini berada dalam suatu lingkungan rawa, yang terletak di sepanjang tanggul sungai. Pembukaan lahan gambut melalui penebangan hutan (*land clearing*) dan drainase yang tidak hati-hati akan menyebabkan penurunan permukaan (subsiden) permukaan yang cepat, pengeringan yang tak dapat balik (*irreversible drying*), dan mudah terbakar.

Potensi gambut yang sangat besar di wilayah ini perlu dikelola secara arif sehingga dapat memberikan nilai tambah tanpa merusak fungsi alami lahan gambut itu sendiri. restorasi gambut yang menyelaraskan antara fungsi ekonomi dan fungsi ekologi akan memberikan dampak positif dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.



Pengembangan kebun kelapa sawit di Provinsi Riau akan mengkonversi lahan gambut, karena sebesar kurang lebih 4 juta hektar dari daratannya terdiri atas lahan gambut (BBSDL, 2009). Konversi lahan gambut akan meningkatkan laju oksidasi sehingga rentan kebakaran, subsiden, banjir, dan intrusi air laut. Gangguan fungsi rawa gambut juga dapat menyebabkan lepasnya karbon ke atmosfer dan mendorong laju perubahan iklim (CCFPI, 2005; Las, Nugroho dan Hidayat, 2008).

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau. Adapun alasan dilakukan pemilihan obyek penelitian disebabkan rusaknya ekosistem gambut di Provinsi Riau dan untuk hal tersebut Faktor-Faktor Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau menjadi sangat penting.

Di dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif mengingat maksud dan tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan penggunaan metode kualitatif. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menemukan fakta dengan interpretasi dengan melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif artinya penelitian tidak bersifat mengukur suatu variabel, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan operasional konsep sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari :

1. Peran masyarakat dan pemahaman masyarakat tentang lahan gambut
2. Peran stakeholder atau perusahaan dalam memahami tentang kawasan gambut dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
3. Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam implementasi kebijakan restorasi gambut untuk penanggulangan





kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, menanggulangi kawasan gambut setelah kebakaran hutan dan lahan

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang Faktor-Faktor Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dari kalangan aparat implementor kebijakan ada yang memiliki jabatan tertentu ada juga sebagai staf, masyarakat dan juga dari LSM.

Prosedur penelitian ini disusun menjadi dua tahap, yaitu: tahap pralapangan dan tahap pekerjaan lapangan.

- a. Tahap Pralapangan
- b. Tahap Pekerjaan Lapangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahan gambut adalah salah satu jenis lahan marjinal yang dipilih terutama oleh perkebunan besar, karena relatif lebih jarang penduduknya sehingga kemungkinan konflik tata guna lahan relatif kecil. Meskipun lahan gambut memiliki fungsi yang sangat strategis, namun karena Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, menyebabkan alih fungsi atau reklamasi disertai pembuatan drainase lahan gambut alami di Indonesia tidak dapat dihindari. Alih fungsi lahan gambut telah terjadi semenjak beberapa dekade terakhir dan masih terus berlangsung sampai sekarang.

Hutan-hutan rawa gambut ini makin lama makin banyak ditebang dan diganti oleh perusahaan perkebunan dengan kayu dan terutama kelapa sawit. Untuk memproduksi kelapa sawit, permukaan air di tanah-tanah rawa itu harus diturunkan lewat drainase. Oleh karena drainase ini tanah gambut organik akan mengering, menjadi sensitive terhadap api dan kebakaran.

Alih fungsi lahan gambut alami menjadi perkenanan besar memberikan dampak negative maupun positif bagi lingkungan. Keanekaragaman hayati



dengan sendirinya akan menurun. Masyarakat tradisional yang pada awalnya mengambil hasil hutan di sekitar tempat tinggalnya tidak dapat melakukan hal tersebut setelah perkebunan beroperasi. Mereka yang akan tinggal di wilayah sungaitohor juga kehilangan mata pencarian dari ladang mereka yang mengalami pembebasan tanah, walaupun terdapat ganti rugi bagi mereka. Jumlah lahan yang dibebaskan mencapai 1.830 ha secara keseluruhan. Dampak negative lainnya bagi masyarakat adalah penurunan kualitas air sungai, karena pembukaan lahan dan pembuangan limbah cair dari pabrik kelapa sawit. Untuk air minum sejak semula penduduk menggunakan air hujan yang ditampung.

Adapun dampak positif dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi. Kegiatan konstruksi dan operasi perkebunan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 900 sampai 20.000 orang penduduk local untuk dipekerjakan di kebun, pabrik dan sektor pendukung kerumahtanggaan. Selain itu dengan meningkatnya jumlah pekerja, usaha warung makanan minuman telah berkembang dengan baik. Apabila setiap pekerja menghabiskan sekitar Rp. 20.000,- per bulan maka diperkirakan akan terjadi peredaran uang sebesar Rp. 18.000.000,- sampai 400.000.000 per bulan di wilayah tersebut. Dengan demikian peluang usaha baru menjadi terbuka dan sangat menguntungkan.

Sungaitohor merupakan sebuah desa yang terletak di sebuah pulau bernama Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang setiap tahun hutannya membara dan asapnya menutupi desa dan kota hingga ke negara tetangga. Desa ini diberkahi hutan rawa gambut yang lebat dengan tingkat biodiversitas hayati yang tinggi. Di antara pohon alam yang tumbuh di pulau tersebut terdapat pohon rumbia (sagu). Pohon ini memberikan berkah yang amat besar bagi kehidupan masyarakat setempat. Pohon ini merupakan sumber pangan pokok dan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat.

Di Desa Sungaitohor pohon rumbia (sagu) tumbuh subur di hutan-hutan yang tanahnya basah. Pertumbuhan pohon jenis ini bergantung pada basahnya tanah dan gambut. Pohon-pohon inilah yang membuat warga Sungaitohor memiliki penghidupan yang stabil. Namun, galian kanal yang di bangun secara besar-besaran oleh perusahaan dan oleh pemerintah tahun 2007 yang dalamannya kini semakin jauh ke bawah tanah dan mengakibatkan kekeringan



pada hamparan kawasan gambut. Proses pengeringan hamparan hutan gambut itu pun terjadi secara ekstrim yang menyebabkan rentannya terjadi kebakaran hutan.

Kebakaran lahan gambut lebih berbahaya dibandingkan dengan kebakaran pada lahan kering (tanah mineral). Api kebakaran di lahan gambut memiliki karakteristik selain dapat menghasilkan api tajuk dan permukaan, juga dapat menimbulkan api bawah tanah gambut yang menghasilkan asap tebal sehingga banyak merugikan berbagai pihak. Selain kebakaran vegetasi dipermukaan, lapisan gambut juga terbakar dan bertahan lama, sehingga menghasilkan asap tebal akibat pembakaran yang tidak sempurna.

Dampak asap terhadap lingkungan dapat bervariasi mulai dari yang bersifat lokal, yaitu menghalangi pemandangan sampai dengan yang memungkinkan terjadinya pemanasan iklim global. Dampak buruk yang terjadi akibat kebakaran lahan meliputi berbagai sektor kehidupan, mulai dari gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat, hambatan transportasi, kerusakan ekologis, penurunan tingkat kunjungan pariwisata, dampak politik, ekonomi sampai pada gangguan terhadap kesehatan.

Kebakaran hutan gambut Sungai Tohor pada awal tahun 2014 berhasil dipadamkan setelah dilakukannya rekayasa hujan buatan atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta berhasil menurunkan hujan deras selama tiga hari dalam rangka operasi pemadaman api. Namun pada pertengahan Januari 2015, api kembali membakar hutan di sejumlah titik di konsesi perusahaan sagu di Kabupaten Tebingtinggi, tak jauh dari Sungaitohor. Konsesi perusahaan itu merupakan hamparan dengan areal milik PT. LUM yang sudah rusak. Di perusahaan itu, saluran air tersebut, kanal besar juga dibangun, yang artinya pengeringan gambut juga berlangsung dan kerusakan gambut semakin membuat hamparan itu rentan terbakar.

Melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2016 Pemerintah pusat membentuk Badan Restorasi Gambut. Perpres ini yang mengatur pengelolaan lahan gambut dengan restorasi lahan gambut salah satunya dengan membangun sekat kanal (*Canal Blocking*). *Canal blocking* menjadi agenda nasional dalam merestorasi lahan gambut dengan tujuan utamanya mengatasi kebakaran lahan akibat kerusakan sistem gambut. Mencegah kebakaran lahan gambut dengan menjaga lahan



gambut tetap basah dianggap merupakan langkah yang lebih bijaksana dari pada penanggulangan yang menghabiskan tenaga.

Desa Sungai Tohor dipilih karena pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2005 lalu Presiden RI menerima sebuah petisi dari masyarakat daerah tersebut yang mengundang orang nomor satu di RI tersebut untuk blusukan guna melihat dampak luas pascakarhutla terbesar sepanjang sejarah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sungaitohor sendiri dipilih selain menjawab petisi masyarakat di sana, juga merupakan barometer penanganan di daerah lainnya di Riau serta sebagai contoh penanganan di Tanah Air.

Dengan memanfaatkan momentum pertama Presiden yang memiliki perhatian terhadap penanganan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan melihat daerah-daerah yang memang masyarakatnya punya keinginan untuk keluar dari problem-problem gambut rusak dan kebakaran. Itulah sebabnya di pilih Desa Sungaitohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur. Presiden diberikan alternatif atau pilihan terhadap kegiatan-kegiatan perbaikan gambut, salah satunya yang paling mudah dipahami masyarakat dan yang paling simple dilihat oleh Presiden yaitu sekat kanal (*canal blocking*).

Apabila kita lihat sebelumnya, ternyata pembangunan *canal blocking* ini telah dilakukan yaitu sejak tahun 2000 sudah ada di Kalimantan dan beberapa daerah lain di Indonesia. Sekat kanal tersebut sebelumnya dibangun berdasarkan inisiatif local masyarakat dan inisiatif NGO. Namun pada kenyataannya, *canal blocking* yang di bangun di Sungai Tohor ini lah yang berhasil menarik perhatian pemerintah bahkan Presiden sehingga dianggap bagus dan berhasil dalam menjawab solusi dari maslah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Terbukti dengan berkurangnya kebakaran yang terjadi di Desa Sungai Tohor bahkan berhasil mencapai Zero Hotspot pada tahun 2016.

Restorasi hidrologi untuk memperbaiki atau memulihkan kondisi hidrologi gambut yang terganggu atau rusak memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka restorasi gambut di Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Keterlibatan masyarakat setempat dalam upaya restorasi hidrologi memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan aktivitas proses restorasi. Masyarakat yang tinggal di desa-desa berlahan gambut merupakan agen





yang sangat penting terhadap segala kegiatan perlindungan lingkungannya. Mereka merupakan aktor pelaku kegiatan pengguna sumberdaya lahan gambut, dan berkepentingan terhadap pengelolaan yang berkesinambungan. Pengetahuan mereka terhadap tata kelola gambut dan penggunaan sumberdaya serta keterlibatannya pada aksi restorasi gambut yang dicanangkan oleh BRG merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Melalui pemberdayaan masyarakat atas aksi restorasi gambut, partisipasi, serta motivasi masyarakat setempat dapat diketahui keberhasilannya dengan kegiatan aksi restorasi gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kecamatan Tebing Tinggi Timur, salah satu kecamatan yang terletak di Pulau Tebing Tinggi, merupakan pulau yang sebagian wilayah daratannya terdiri atas tanah gambut dengan kedalaman hingga 10 meter. Secara hidrologis, kondisi tersebut sangat rentan terhadap bencana kebakaran, banjir, longsor dan abrasi jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik. Daerah gambut akan menjadi sangat kering akibat dari pengatusan yang berlebihan (*over-drain*) di musim kemarau sehingga mudah sekali terbakar. Lahan gambut yang terbakar akan menimbulkan bencana asap dalam kurun waktu yang relatif lama, karena gambut yang terbakar akan sulit untuk dipadamkan. Lahan gambut yang terbakar akan menyebabkan penurunan muka tanah (*land subsidence*), yang potensial menyebabkan terjadinya bencana banjir di musim penghujan dan atau pada saat pasang air laut. Lahan gambut yang berada di daerah pesisir pantai akan mudah mengalami longsor dan abrasi pantai jika tata airnya tidak dikelola dengan baik.

Hingga Tahun 2016, kondisi lahan gambut di Pulau Tebing Tinggi sudah mengalami degradasi akibat dari alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian atau perkebunan. akibat kebakaran lahan yang terjadi pada kurun waktu 2003 hingga 2015 menyebabkan terdegradasinya lahan gambut yang ada di Pulau Tebing Tinggi. Berdasarkan analisis Citra Landsat-8 OLI Tahun 2016 ditunjukkan bahwa daerah yang terbakar akan terdegradasi dari *Primary peat swamp forest* menjadi *Disturbed/regrowth peat swampforest*. Sedangkan lahan yang masih berupa *Primary peat swamp forest* aman terhadap kebakaran lahan.

### Kondisi Kanal Dan Sekat Kanal Eksisting



Inventarisasi kanal yang ada di lokasi studi sangat penting dilakukan untuk mengetahui potensi pengatusan kawasan lahan gambut yang berpotensi menjadikan lahan gambut menjadi kering. Sedangkan inventarisasi sekat kanal yang ada dilakukan untuk mengetahui upaya restorasi hidrologi yang telah dilakukan sedemikian sehingga analisis kebutuhan untuk pembangunan sekat kanal baru bisa diperkirakan. Kanal yang ada sangat rapat pada wilayah perkebunan perusahaan PT. LUM yang mana pada daerah tersebut merupakan kubah gambut. Sedangkan kanal di Desa Sungaitohor.

Barat, Nipah Sendanu, Sendanu Darul Ikhsan, Tanjung Sari, dan Lukun relatif sedikit. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa keberadaan kanal tersebut sangat mengganggu kondisi hidrologis di daerah studi.

Upaya restorasi hidrologi sudah dilakukan dengan membangun sekat kanal melalui partisipasi masyarakat setempat. Berikut disajikan lokasi sekat kanal yang telah dibuat di daerah studi dimana jumlahnya masing-masing desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Lokasi Sekat Kanal Yang Telah Dibuat**

No	Nama Desa	Jumlah Sekat Kanal
1.	Sendanu Darul Ihsan	3
2.	Tanjung Sari	9
3.	Sungai Tohor	13
4.	Sungai Tohor Barat	10

Kecamatan Tebing Tinggi Timur, salah satu kecamatan yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi, merupakan pulau yang sebagian wilayah daratannya terdiri dari tanah gambut dengan kedalaman hingga 10 meter. Secara hidrologis, kondisi tersebut sangat rentan terhadap bencana kebakaran, banjir, longsor dan abrasi jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik. Daerah gambut akan menjadi sangat kering dari pengatusan yang berlebihan (over-drain) di musim kemarau sehingga lahan gambut yang terbakar akan menimbulkan bencana dalam kurun waktu yang relatif lama, karena gambut yang terbakar akan sulit dipadamkan. Lahan gambut yang terbakar akan menyebabkan penurunan permukaan tanah (land subsidence), yang potensial menyebabkan terjadinya bencana banjir di musim penghujan dan atau pada saat pasang air laut. Lahan gambut yang



berada di daerah pesisir pantai akan mudah mengalami longsor dan abrasi pantai jika tata airnya tidak dikelola dengan baik. Hingga Tahun 2016, kondisi lahan gambut di Pulau Tebing Tinggi sudah banyak mengalami degradasi akibat dari alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian atau perkebunan. Akibat kebakaran lahan yang terjadi pada kurun waktu 2013 hingga 2015 menyebabkan terdegradasinya lahan gambut yang ada di Pulau Tebing Tinggi.

Dengan adanya Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut Tahun 2016-2020 yang berisi Penyelenggaraan upaya pemulihan ekosistem gambut yang rusak menjadi tanggung jawab pemerintah cq. BRG. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Dalam menyelenggarakan upaya memulihkan fungsi ekosistem gambut untuk mencegah berulangnya kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap, BRG mempunyai tugas memfasilitasi dan mengkoordinasi restorasi ekosistem gambut seluas 2 (dua) juta hektar.

Berdasarkan isu-isu strategis di internal dan eksternal BRG, lingkungan strategis BRG dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Dari hasil analisis tersebut, disimpulkan bahwa sasaran strategis BRG termasuk meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam kesatuan hidrologis gambut agar dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia dan lingkungan. Badan Restorasi Gambut bertugas mencapainya tiga sasaran restorasi, yaitu: (1) pemulihan hidrologi, vegetasi dan daya dukung sosial-ekonomi ekosistem gambut yang terdegradasi; (2) perlindungan ekosistem gambut bagi daya dukung kehidupan; (3) penataan ulang pengelolaan [pemanfaatan] ekosistem gambut secara berkelanjutan. Dari tugas tersebut, objek yang dikelola oleh BRG adalah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Berikut daftar Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Kecamatan Tebing Tinggi:

**Tabel 2**  
**Kondisi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Pulau Tebing Tinggi**

Kondisi KHG Pulau Tebingtinggi	Luas (ha)	Prosen
1. KHG	129,155.97	



Kondisi	KHG Pulau Tebingtinggi	Luas (ha)	Prosen
Luas Gambut		129,155.97	100% dari luas KHG
Luas Kubah		67,749.80	52% dari luas gambut, 52 % dari luas KHG
Luas Kubah terbakar		185.03	0.14% dari luas gambut, 0.27% dari luas kubah
Luas gambut terbakar		185.03	0.14% dari luas gambut
Luas jaringan kanal		76,102.5	59% dari luas gambut
Luas jaringan kanal di kubah gambut		28,361.4	42% dari luas kubah
Luas kubah gambut berkanal terbakar		0	0% dari luas kubah berkanal

Sumber: Badan Restorasi Gambut Dalam Angka, 2017

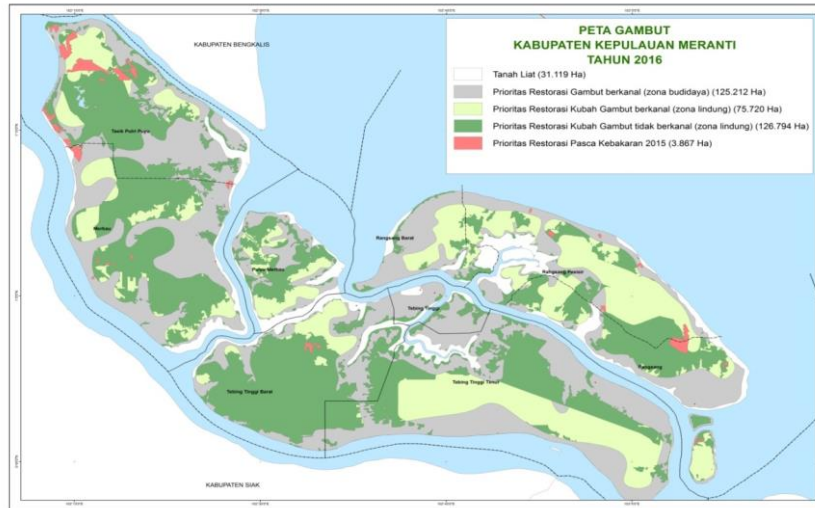
Kondisi hidrologis gambut Pulau Tebing Tinggi makin cepat mengalami kekeringan dengan adanya kanal-kanal yang membelah kubah-kubah gambut yang ada. Kebakaran lahan gambut banyak terjadi pada daerah yang telah dibuat kanal sedangkan pada lahan gambut yang masih asli sangat jarang terjadi kebakaran lahan gambut. Hal ini terjadi karena lahan gambut menjadi sangat mudah kering dengan adanya kanal, sedangkan yang masih asli tetap basah karena sifat tanah gambut yang mampu menyimpan air.

Restorasi itu sendiri merupakan tindakan yang dilakukan untuk membawa ekosistem yang telah terdegradasi kembali menjadi semirip mungkin dengan kondisi aslinya. Sedangkan restorasi lahan gambut berarti kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan kembali lahan gambut terutama yang telah rusak sehingga gambut menjadi pulih kembali sesuai dengan kondisi aslinya. Sejauh ini, dalam upaya untuk merestorasi, Badan Restorasi Gambut (BRG) khususnya bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan kegiatan yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.







Sumber : Bappeda Kabupaten Meranti 2016

**Gambar 1**

**Peta Lahan Gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dari peta diatas dapat dilihat bahwa prioritas restorasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Prioritas restorasi gambut berkanal (zona budidaya) sebanyak 125.212 Ha.
2. Prioritas restorasi kubah gambut berkanal (zona lindung) sebanyak 75.720 Ha.
3. Prioritas restorasi kubah gambut tidak berkanal (zona lindung) sebanyak 126.794 Ha.
4. Prioritas restorasi pasca kebakaran tahun 2015 sebanyak 3.867 Ha.

Untuk Kepulauan Kabupaten Meranti, prioritas program BRG adalah yang

tersebut 3R (Rewetting, Revegetasi, dan Revitalisasi) sedangkan rencana program

Restorasi Gambut di Provinsi Riau secara keseluruhan antara lain dapat

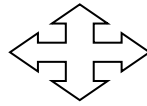
dilihat dari gambar berikut ini:

**PROGRAM BRG DI PROVINSI RIAU TAHUN 2017**

Pembangunan Sumur Bor  
sebanyak 550 Unit  
Pembangunan Sekat Kanal  
sebanyak 830 unit  
Fasilitasi Sekretariat Tim  
Restorasi Gambut Daerah  
(TRGD)

- Pembentukan Desa Peduli Gambut
- Penyusunan RREG
- Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut





- Revegetasi
- Revitalisasi Ekonomi
- Penyusunan SID dan DED Infrastruktur Pembasahan Gambut
- Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat Desa

**Gambar 2**  
**Rencana Kegiatan Badan Restorasi Gambut di Provinsi Riau**

### Upaya Mengatasi Subsidence Gambut untuk Keberlanjutan Lahan

Permasalahan pokok dalam pengelolaan lahan gambut adalah pengelolaan subsidence atau pemadatan gambut. Kesalahan fatal dalam mengelola subsidence akan berdampak kerusakan gambut yang *irreversible* karena apabila gambut tersebut kembali digenangi air, maka kepadatan tidak akan berbalik kembali.

Pemanfaatan lahan gambut untuk areal perkebunan memerlukan suatu perlakuan khusus, yaitu berupa pengendalian tata air gambut dengan membangun jaringan drainase yang kompleks. Pembuatan saluran drainase tersebut perlu dilakukan dengan perhitungan yang akurat dengan mempertimbangkan ketebalan gambut, kondisi hidrologis dan curah hujan. Pada prinsipnya pengelolaan bertujuan agar gambut tidak terlalu kering pada musim kemarau maupun terlalu basah pada musim penghujan. Dalam pembuatan kanal perlu diperhatikan kedalamannya, sehingga lahan gambut masih sedikit basah, namun daun, ranting dan pohon di atasnya jika ditebang masih dapat mengering. Permukaan gambut harus dipertahankan menjadi sedikit basah, menjaga penurunan permukaan air secara perlahan, tetapi cukup dapat membuang air yang ada di gambut. Adapun sistem drainase yang dibangun di lokasi penelitian meliputi saluran-saluran primer, sekunder dan kuarter. Dalam mengelola tata air tersebut dimanfaatkan pula dam, waduk dan pintu air untuk mengendalikan ketinggian permukaan air. Dengan cara tersebut potensi terjadinya subsidence meskipun ada, akan lebih terkendali.



## SIMPULAN

Dalam upaya Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

1. Konseptualisasi program restorasi lahan gambut, perlu pengetahuan para implementor mengenai program restorasi lahan gambut. Kesiapan Kelembagaan Pelaksana, dalam hal ini Badan Restorasi Gambut BRG pusat dirasa cukup siap dalam melaksanakan program restorasi lahan gambut namun terdapat kendala yang dihadapi dilapangan seperti koordinasi dan sosialisasi tentang peningkatan ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan ekosistem gambut.
2. Dalam pembangunan *canal blocking* sebagai solusi pencegahan kebakaran lahan gambut di Provinsi Riau perlu memperhatikan faktor regulasi pemerintah, partisipasi masyarakat berupa keikutsertaan dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan *canal blocking*. Serta kesadaran masyarakat sebagai subjek yang merasakan manfaat dari adanya *canal blocking* ini. Berikutnya adalah kearifan lokal masyarakat terhadap gambut. Masyarakat juga harus menjaga kelestarian lahan gambut yang merupakan sumber kehidupan mereka yang secara turun temurun telah memanfaatkannya untuk mengolah sagu.
3. Banyak konversi mengenai pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian dan perkebunan. Setiap ekosistem secara ideal memang seharusnya dibiarkan alami seperti apa adanya sehingga kekayaan keanekaragaman hayati terjaga, namun demikian, mesti dipertimbangkan pula kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga alih fungsi lahan alami terjadi. Bahwa pengelolaan tata air merupakan hal yang paling penting dalam mengelola lahan gambut karena tata air yang benar akan memperkecil subsidensi gambut. Pelajaran yang dapat ditarik dari industri perkebunan besar untuk perkebunan rakyat adalah upaya dan strategi pengelolaan tata air secara bersama-sama oleh sejumlah pemilik kebun sehingga didapatkan skala pengelolaan tata air yang efektif terkoordinasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F., dan I.G. Subiksa. 2008. *Lahan gambut: potensi untuk pertanian dan aspek lingkungan*. Balai Penelitian Tanah. Badan Litbang Pertanian. World Agroforestry Centre. Bogor.
- BALIBANG PEMPROV RIAU. 2010. *Seminar dan Lokakarya: Pengelolaan Terpadu Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Riau*
- CCFPI. 2005. *Pemanfaatan Lahan Gambut secara Bijaksana untuk Manfaat Berkelanjutan*. Seri Prosiding 08. Ditjen Bina Bangda - Depdagri, Ditjen PHKA - Dephut, Pemprop. Kalimantan Tengah, Pemprop. Riau, Wetlands International - Indonesia Programme, Wildlife Habitat Canada, Global Environment Centre, WWF - Indonesia, Care International - Indonesia, Yayasan BOS - Mawas, LP3LH. Bogor.
- Cresswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. California: Sage Publications
- Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2009
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi II*. Penyunting Muhadjir Darwin. Gajah Mada University Press: Yogyakarta
- KMNLH [Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup]. 1997. *Agenda 21 Indonesia: A National Strategy for Sustainable Development*. KMNLH dan UNDP. Jakarta
- Kampanye WALHI Kalsel [andy@walhikalsel.org](mailto:andy@walhikalsel.org)  
<http://www.walhikalsel.org/content/view/131/48/>
- Kafafiah, Faisal. 1995. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press
- Koeriatmadja, R.E. 1997. *Dampak Kebakaran Hutan Serta Daya Tanggap Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Terhadapnya*. Prosiding Simposium: "Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sumberdaya Alam dan Lingkungan". Tanggal 16 Desember 1997 di Yogyakarta
- Shah, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta
- Meter, Donal S. & Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. London: Sage Publications Inc.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Wibawa, Samudera dkk. 2014. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Intermedia, Jo 1994

Winarno, Budi., 2002., *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Perssindo: Yogyakarta

